

Dr. Hendri: Melawan 'Cognitive War' Tidak Bisa dengan Narasi Belaka, Tapi dengan Fakta dan Kerja Nyata

Updates. - KORLANTAS.ID

Jun 25, 2026 - 07:57



OPINI - Di era ketika informasi bergerak lebih cepat daripada klarifikasi, perang tidak lagi selalu hadir dalam bentuk senjata, tank, atau pertempuran fisik. Hari ini, perang dapat masuk melalui layar ponsel, percakapan media sosial, potongan video, judul provokatif, meme politik, hingga opini-opini yang sengaja dibangun untuk menggoyahkan kepercayaan publik. Inilah yang sering disebut sebagai

cognitive war atau perang kognitif, yaitu perang yang menargetkan cara manusia berpikir, merasa, menilai, dan mengambil keputusan.

Namun ada satu hal penting yang harus disadari: melawan 'cognitive war' tidak cukup hanya dengan membalas narasi. Tidak cukup hanya dengan membuat slogan tandingan. Tidak cukup hanya dengan marah terhadap buzzer, hoaks, fitnah, atau framing negatif. Karena dalam perang kognitif, publik tidak hanya membutuhkan bantahan. Publik membutuhkan bukti.

Narasi memang penting. Tetapi narasi tanpa fakta akan mudah runtuh. Komunikasi memang perlu. Tetapi komunikasi tanpa kerja nyata akan terdengar kosong. Publik hari ini semakin kritis. Mereka tidak lagi mudah percaya hanya karena ada pernyataan resmi, konferensi pers, atau unggahan media sosial. Mereka ingin melihat apakah ucapan sejalan dengan tindakan. Mereka ingin melihat apakah janji berubah menjadi hasil. Mereka ingin melihat apakah negara hadir, bukan hanya berbicara.

Di sinilah letak kelemahan banyak institusi dalam menghadapi perang kognitif. Ketika muncul isu negatif, respons yang sering dilakukan hanya sebatas membuat klarifikasi. Padahal, klarifikasi yang tidak didukung data, dokumentasi, transparansi, dan tindakan konkret justru bisa memperlebar jurang ketidakpercayaan. Masyarakat dapat merasa bahwa negara hanya sibuk membela diri, bukan memperbaiki keadaan.

'Cognitive war' bekerja dengan memanfaatkan ruang kosong. Ruang kosong informasi. Ruang kosong pelayanan. Ruang kosong keadilan. Ruang kosong kehadiran negara. Ketika masyarakat tidak memperoleh informasi yang jelas, hoaks akan masuk. Ketika rakyat tidak merasakan manfaat kebijakan, propaganda akan tumbuh. Ketika keluhan publik tidak dijawab dengan tindakan, kemarahan akan mudah diarahkan menjadi ketidakpercayaan terhadap institusi.

Karena itu, senjata utama melawan perang kognitif bukan sekadar narasi tandingan, melainkan fakta yang dapat diperiksa dan kerja nyata yang dapat dirasakan.

Jika ada tuduhan bahwa pemerintah tidak hadir, jawabannya bukan hanya pernyataan bahwa pemerintah hadir. Jawabannya adalah tunjukkan data pelayanan, hadirkan petugas di lapangan, selesaikan masalah warga, dan dokumentasikan prosesnya secara jujur. Jika ada isu bahwa ekonomi rakyat terabaikan, jawabannya bukan hanya pidato optimisme. Jawabannya adalah lapangan kerja, harga pangan terkendali, akses usaha kecil diperluas, dan bantuan yang tepat sasaran. Jika ada framing bahwa aparat jauh dari rakyat, jawabannya bukan hanya slogan kemanunggalan. Jawabannya adalah prajurit, polisi, dan aparaturnya yang benar-benar membantu masyarakat di desa, sekolah, pasar, sawah, dan ruang-ruang kehidupan rakyat.

Perang kognitif tidak akan kalah oleh pencitraan. Ia hanya bisa dikalahkan oleh kepercayaan. Dan kepercayaan tidak bisa dipaksa. Kepercayaan dibangun melalui konsistensi antara kata dan perbuatan.

Di tengah derasnya arus disinformasi, institusi negara harus memiliki budaya komunikasi yang baru. Komunikasi publik tidak boleh hanya reaktif, menunggu

isu viral baru bergerak. Komunikasi publik harus proaktif, terbuka, cepat, berbasis data, dan menyentuh kebutuhan masyarakat. Setiap program harus memiliki jejak digital yang jelas. Setiap kebijakan harus dijelaskan dengan bahasa sederhana. Setiap keberhasilan harus disampaikan tanpa berlebihan. Setiap kekurangan harus diakui dengan tanggung jawab.

Kejujuran adalah fondasi penting dalam melawan perang kognitif. Publik tidak selalu menuntut negara sempurna. Tetapi publik menuntut negara jujur. Mengakui masalah bukan kelemahan. Justru dari pengakuan itulah lahir kepercayaan. Yang berbahaya adalah ketika kesalahan ditutup-tutupi, data dimanipulasi, kritik dianggap musuh, dan semua persoalan dijawab dengan propaganda. Cara seperti itu bukan melawan 'cognitive war', melainkan memberi amunisi baru bagi lawan.

Selain fakta dan kerja nyata, ketahanan masyarakat juga harus diperkuat. Literasi digital tidak boleh berhenti pada imbauan "jangan percaya hoaks". Masyarakat perlu diajari cara memeriksa sumber, memahami konteks, membedakan kritik dengan fitnah, membedakan data dengan opini, serta mengenali pola manipulasi emosi. Sebab dalam perang kognitif, yang diserang bukan hanya informasi, tetapi juga psikologi publik: rasa takut, marah, kecewa, curiga, dan putus asa.

Maka negara, media, kampus, tokoh masyarakat, tokoh agama, komunitas digital, dan warga biasa harus menjadi bagian dari pertahanan kognitif nasional. Pertahanan ini tidak dibangun dengan sensor berlebihan, tetapi dengan ekosistem informasi yang sehat. Kritik tetap harus hidup. Pers tetap harus bebas. Masyarakat tetap harus berani menyampaikan keluhan. Tetapi kebebasan itu harus dijaga agar tidak berubah menjadi ruang gelap bagi fitnah, adu domba, dan penghancuran kepercayaan nasional.

Pada akhirnya, perang kognitif adalah perang memperebutkan kepercayaan. Siapa yang dipercaya publik, dialah yang menang. Dan kepercayaan publik tidak dimenangkan oleh suara paling keras, tetapi oleh pihak yang paling konsisten menghadirkan kebenaran, keadilan, dan manfaat nyata.

Melawan 'cognitive war' berarti negara harus bekerja lebih baik, berbicara lebih jujur, melayani lebih cepat, dan hadir lebih dekat. Narasi tetap diperlukan, tetapi ia harus menjadi cermin dari kenyataan, bukan pengganti kenyataan. Sebab rakyat tidak bisa terus-menerus diberi kata-kata. Rakyat membutuhkan bukti.

Maka rumusnya sederhana: lawan hoaks dengan fakta, lawan propaganda dengan transparansi, lawan fitnah dengan integritas, lawan pesimisme dengan hasil kerja, dan lawan perang kognitif dengan kehadiran nyata di tengah rakyat.

Karena pada akhirnya, narasi terbaik adalah kerja nyata yang dirasakan masyarakat.

Jakarta, 24 Juni 2026

Dr. Ir. Hendri, ST., MT

Ketua Umum Jurnalis Nasional Indonesia (INI)